

P R A K A R S A Policy Brief

November 2020



Kontribusi UMKM Perempuan pada ekonomi nasional

Partisipasi perempuan di sektor UMKM cukup tinggi. Meskipun data terpilah berdasarkan gender untuk UMKM belum tersedia, jumlah pelaku UMKM dapat diekstrapolasi pada data-data yang ada. Hasil survei Dunia Usaha oleh Bank Dunia menemukan bahwa 42,8 persen UMKM dimiliki perempuan. Sedangkan pada data Sakernas yang dirilis BPS, pekerja formal perempuan mencapai 46,7 persen. Sehingga dengan rasio ketenagakerjaan formal 47,0 persen pada 2013, diperkirakan 43 persen UMKM di Indonesia dimiliki oleh perempuan (IFC, 2016).

Seperti di negara-negara lain, UMKM di Indonesia yang dikelola kelompok perempuan Sebagian besar masih berskala kecil. Hanya saja, dari sisi persentase, wirausaha perempuan di Indonesia cukup tinggi yaitu 21%. Jumlah ini jauh lebih tinggi di atas rata-rata global yang mencapai 8% (Sasakawa Peace Foundation & Dalberg, 2020).

Dari sisi kategorikal skala usaha, dengan menggunakan definisi UMKM menurut regulasi, IFC (2016) menemukan usaha yang dikelola perempuan berada dalam kategori sebagai berikut: 52,9 persen usaha mikro, 50,6 persen usaha kecil, dan 34 persen usaha menengah di daerah perkotaan. Jumlah UMKM secara umum dan UMKM yang dikelola oleh perempuan dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Jika usaha milik perempuan dan pekerjaan formal perempuan tetap seperti pada 2013 hingga 2015 maka dapat diasumsikan UMKM Perempuan memberikan kontribusi Rp 443 triliun (\$ 36,5 miliar) dan usaha menengah milik perempuan Rp 421 triliun (\$ 34,6 miliar) untuk perekonomian Indonesia. Ini senilai dengan 9,1 persen PDB negara (IFC, 2016). Meskipun demikian, kontribusi ini relatif kecil dibandingkan dengan kontribusi perusahaan yang jumlahnya jauh di bawah UMKM yaitu sebanyak 5,066 units / 0.01% (KemenKop UKM, 2017). Oleh karenanya dibutuhkan peningkatan pemberdayaan UMKM

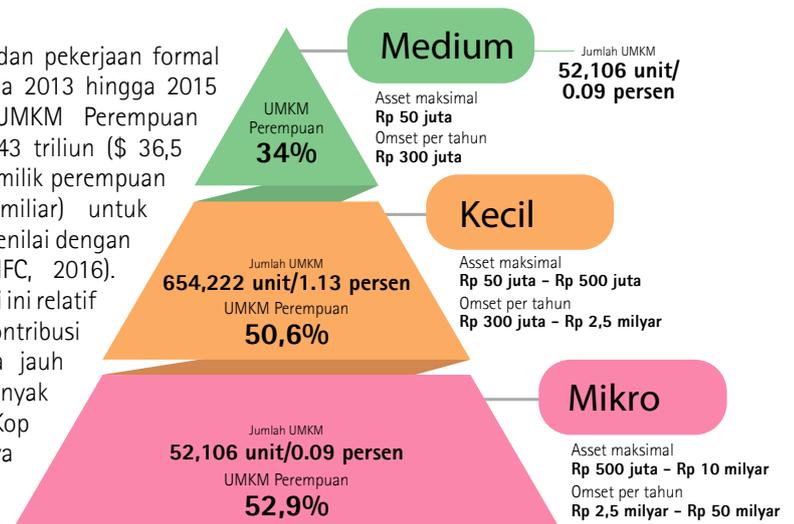
perempuan agar lebih berkualitas dan memiliki produktifitas tinggi.

Dampak Pandemi Covid19 Terhadap UMKM Perempuan

Covid19 yang mulai mewabah pada Maret 2020 secara gamblang telah memukul sektor usaha di Indonesia. Untuk mengkaji ini, PRAKARSA melakukan sebuah survey secara online kepada perempuan pelaku UMKM. Adapun tujuan survey yang dilakukan antara lain: 1). Untuk mengetahui dampak pandemic Covid19 terhadap UMKM perempuan 2). Untuk mengetahui dukungan Lembaga keuangan terhadap UMKM yang dikelola perempuan dalam menghadapi guncangan pandemi. 3). Untuk mengetahui dukungan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil terhadap UMKM perempuan. Berdasarkan hasil survey beberapa temuan penting dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, hanya sebagian UMKM yang masih bertahan menjalankan usahanya. Jika dilihat dari jenis usahanya, UMKM Perempuan yang mampu bertahan di masa pandemi adalah sebagai berikut: usaha kuliner 50%, usaha sembako 20%, usaha kriya 10%, usaha florikultura 10% dan usaha busana 10% (The Prakarsa, 2020).

Kedua, faktor pendukung UMKM perempuan untuk dapat terus menjalankan usahanya adalah



Pesan Kunci:

- Dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap UMKM terutama UMKM Perempuan antara lain: terhentinya usaha, PHK karyawan dan pengurangan jam kerja untuk karyawan.
- UMKM Perempuan belum mendapatkan bantuan memadai baik dari pemerintah, sektor swasta maupun dari organisasi masyarakat sipil. Bahkan lembaga keuangan formal masih minim dalam memberikan akses permodalan terhadap kelompok UMKM Perempuan
- Penggunaan teknologi dapat menjaga keberlangsungan usaha di tengah pandemi COVID 19 dan meminimalisir kerugian omset, namun literasi teknologi hanya dikuasai oleh sebagian kecil UMKM Perempuan.

kemampuannya dalam mengembangkan strategi berinovasi oleh UMKM Perempuan di Masa Pandemi Covid-19 yakni: pemasaran online, berganti jenis usaha, manajemen keuangan, diversifikasi produk dan inovasi produk (The Prakarsa, 2020).

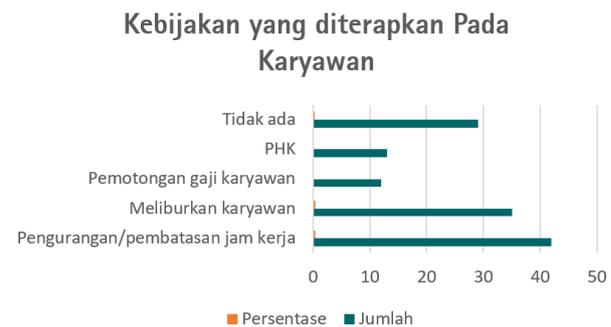
Ketiga, secara rinci, dampak pandemi Covid19 terhadap UMKM perempuan adalah antara lain: penurunan omset secara drastis, menghadapi kendala pemasaran produk – terutama pada periode PSBB, modal yang habis dan kesulitan mengakses modal, dan kesulitan memperoleh bahan baku.

Gambar 1. Ilustrasi dampak pandemi terhadap UMKM perempuan yang dihitung dari hasil survey



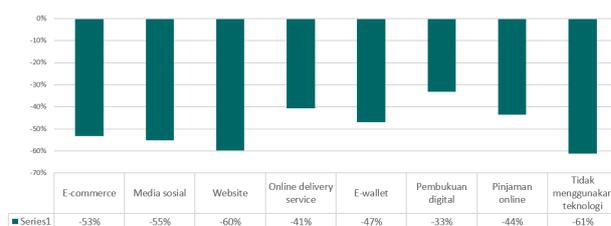
Keempat, atas kesulitan yang dihadapi, UMKM yang dikelola perempuan memberikan dampak domino kepada karyawannya sehingga UMKM mengambil beberapa kebijakan sebagaimana berikut:

Gambar 2. Kebijakan UMKK Perempuan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19



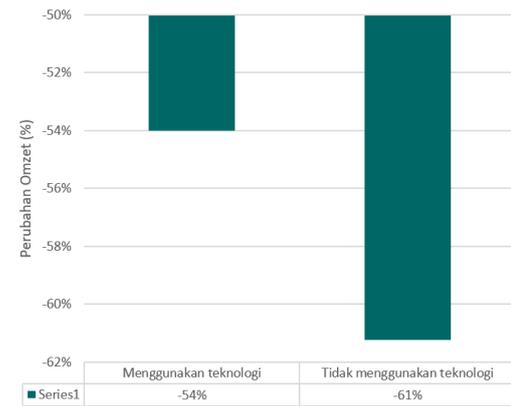
Kelima, teknologi penopang UMKM untuk bertahan di masa pandemi. Dari sejumlah UMKM yang mampu bertahan dan tetap menjalankan usahanya dikarenakan pemanfaatan teknologi informasi baik yang sudah berjalan sebelum atau sesudah pandemi terjadi. Tercatat 92% UMKM yang bertahan menegaskan bahwa teknologi informasi sebagai faktor pendorong utama tetap berjalannya usaha. Meski demikian, secara umum, jumlah UMKM yang memanfaatkan teknologi sangatlah sedikit. Berdasarkan data Keminfo (2020), hanya sekitar 16% atau 9,4 juta UMKM yang menggunakan platform online.

Gambar 3. Bentuk Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh UMKM Perempuan



Dari hasil perhitungan data survey, penggunaan teknologi selain dapat mempertahankan usaha, juga dapat meminimalisir kerugian omset disaat pandemi.

Gambar 4. Perubahan Omzet dan Penggunaan Teknologi Informasi



Rendahnya literasi teknologi pada kelompok UMKM perempuan telah menjadi rahasia umum. Akar masalahnya tidak dapat dipisahkan dari stereotype gender dan ketimpangan akses antara laki-laki dan perempuan sehingga menghambat perempuan untuk mendapatkan kesempatan belajar, mendapat manfaat dan berkarir pada bidang STEM (Asriyani & Ramdlaningrum, 2019). Sayangnya pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan UMKM belum memfasilitasi secara optimal penggunaan teknologi informasi baik dalam hal pemberian pelatihan atau penyediaan sarana teknologi. Sumber pengetahuan UMKM Perempuan tentang teknologi informasi: belajar sendiri 87%, diajari teman dan keluarga 35%, mengikuti pelatihan dari komunitas UMKM 34%, mendapatkan pelatihan dari pemerintah 20% dan mendapatkan pelatihan dari organisasi masyarakat sipil 9% (The Prakarsa, 2020).

Survey ini juga menangkap kesadaran perempuan pelaku UMKM akan pentingnya teknologi informasi. Responden survey menyatakan bahwa dalam mempelajari pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung usahanya jenis pelatihan yang diinginkan yakni: pemasaran melalui internet 76%, akses permodalan secara online 57%, pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan produksi 48% dan pemanfaatan teknologi untuk pembukuan keuangan 44% (The Prakarsa, 2020).

Dukungan Pemerintah dan OMS

Selama ini, pemerintah dan OMS (organisasi masyarakat sipil) merupakan aktor yang paling dominan dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada UMKM. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan OMS antara lain: pelatihan teknologi, restrukturisasi pinjaman bank, bantuan penyediaan bahan baku, relaksasi kredit, sembako, pembebasan pengurangan tarif listrik, bantuan sosial tunai, bantuan modal, penyaluran terkait protokol covid-19 dan pelatihan usaha. Namun demikian, antara 70% - 83% menyatakan tidak menerima bantuan dari pemerintah dan OMS selama pandemi. Adapun bagi responden yang menerima bantuan menyatakan bentuk-bentuk bantuan adalah sebagai berikut:

Gambar 5. Jenis Bantuan Pemerintah yang Diterima UMKM Perempuan



Dukungan dari OMS cukup berdampak baik bagi UMKM Perempuan, dampak yang dirasakan antara lain: usaha lebih berkembang, keahlian dalam menjalankan usaha meningkat, manajemen operasional meningkat, lebih mudah dalam melakukan pemasaran dan lebih mudah melakukan pembelian bahan baku (The Prakarsa, 2020). Sedangkan dampak dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah antara lain:

Gambar 5. Dampak Bantuan Pemerintah terhadap UMKM Perempuan



UMKM Perempuan dan Lembaga Keuangan

Hasil survei menunjukkan bahwa UMKM Perempuan masih memiliki keterbatasan dalam Terbatasnya mengakses keuangan formal. Lembaga keuangan (bank dan non-bank) memiliki peran sentral dalam mendorong UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Namun demikian, lembaga keuangan formal dinilai kurang memberikan dukungan kepada kelompok UMKM Perempuan. Analisis ini diperkuat oleh studi The PRAKARSA (2019) tentang penelitian KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk perempuan di Indonesia. Laporan tersebut menjelaskan bahwa meskipun kebijakan KUR telah beberapa kali direvisi untuk mengisi gap dengan pelaksanaannya di lapangan, terlebih setelah tahun 2014, kebijakan KUR tidak lagi menyentuh pendekatan afirmatif gender dalam penyaluran kredit atau bantuan keuangan lainnya. Revisi kebijakan KUR belum mengatur secara eksplisit bahwa kebijakan KUR harus inklusif gender. Perempuan mengalami kesulitan untuk mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal karena persyaratan agunan.

Dalam masyarakat patriarki, aset keluarga cenderung dimiliki oleh laki-laki. Selain itu, perempuan dari kelompok marginal tidak memiliki aset berharga untuk dijadikan agunan sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman. Dalam banyak kasus di mana perempuan bisa mendapatkan pinjaman, perempuan menggunakan dana KUR tidak hanya untuk menambah modal usaha mikro keluarga tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dekat. Pada tataran kebijakan, produk KUR sebagai instrumen untuk meningkatkan inklusi keuangan belum mengakomodir beragam kebutuhan penerima KUR, terutama bagi kelompok marginal termasuk perempuan (The Prakarsa, 2019).

Survei ini turut mengkonfirmasi hasil berbagai studi sebelumnya bahwa perempuan tidak memiliki akses yang

memadai terhadap akses keuangan formal. Dari total responden survey, hanya 27 persen perempuan pelaku UMKM mendapatkan bantuan dari lembaga keuangan formal, sedangkan 73 persen tidak mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Adapun alasan pelaku UMKM Perempuan tidak mengakses lembaga keuangan formal antara lain: tidak mengetahui tata cara pengajuan kredit sebanyak 30%, tidak memenuhi persyaratan sebanyak 22%, tidak memerlukan modal tambahan sebanyak 30%, tidak ingin mengajukan kredit sebanyak 7%, pengajuan kredit ditolak sebanyak 7%, takut tidak dapat membayar sebanyak 5% dan alasan lainnya sebanyak 11%. Literasi atau ketidaktahuan pelaku UMKM Perempuan tentang tata cara mengajukan kredit menunjukkan minimnya literasi keuangan serta pengetahuan tentang potensi pengembangan bisnis dari peluang permodalan. Di tengah situasi seperti ini, lembaga keuangan kurang mengambil peran.

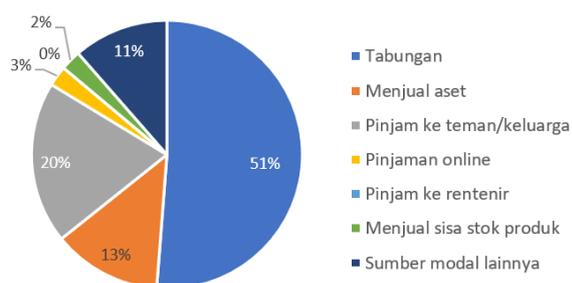
Secara lebih detail, survei juga menanyakan sumber permodalan yang selama ini diakses oleh perempuan pelaku UMKM sebelum pandemi. Uraian dapat dilihat dalam chart berikut ini:

Sumber modal sebelum pandemi



Sedangkan pada masa pandemi, tidak ada responden yang menyatakan mendapatkan pinjaman modal dari Lembaga keuangan formal namun dari sumber-sumber lain yaitu:

Jumlah



Kesimpulan dan rekomendasi

Dari hasil survey dan analisis yang diuraikan pada bagian sebelumnya, pandemi Covid19 telah berdampak negatif terhadap UMKM khususnya UMKM Perempuan. Selain telah menurunkan omset secara signifikan, Covid19 telah mengakibatkan pendapatan sejumlah karyawan berkurang. Bahkan pada kasus yang paling buruk, sejumlah karyawan kehilangan pekerjaannya yang disebabkan oleh terhentinya usaha yang dikelola. Riset ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 dimana dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah saat itu belum tersedia. Pada saat itu, bantuan yang diterima oleh UMKM sangat minim. Hanya sedikit UMKM perempuan yang melaporkan telah menerima bantuan yaitu hanya 30% dan 70% belum menerima bantuan apapun.

Penanggungjawab Pelaksana:**Ah Maftuchan**

Perkumpulan PRAKARSA Executive Director

Ditulis oleh :

- Herni Ramdlaningrum
- Fiona Armitasari
- Cut Nurul Aidha
- Dwi Rahayu Ningrum

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bambu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798

Fax +6221 781 1897

perkumpulan@theprakarsa.org

Perkumpulan PRAKARSA adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **PRAKARSA Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

Disclaimer: Policy Brief ini diterbitkan oleh Perkumpulan PRAKARSA berdasarkan laporan riset mengenai Dampak Covid19 terhadap UMKM Perempuan di Indonesia.

Sejumlah UMKM Perempuan berhasil bertahan bahkan meningkat omsetnya pada masa pandemi karena kemampuan inovasi dan adaptasi yang baik seperti diversifikasi produk dan pemanfaatan teknologi. Akses UMKM perempuan terhadap permodalan dari lembaga keuangan formal masih memprihatinkan. Perbankan tampaknya masih enggan untuk memberikan dukungan optimal pada kelompok UMKM perempuan. OMS perlu untuk terus melakukan advokasi baik pada tingkat implementasi ataupun kebijakan agar akses permodalan dari sektor keuangan formal dapat diberikan kepada UMKM perempuan. Pemerintah dalam hal ini Kemenkop UKM, KPPA dan OJK harus bersinergi untuk merumuskan kebijakan yang lebih kuat untuk memastikan lembaga keuangan berpihak kepada kelompok UMKM perempuan.

Dampak manfaat teknologi terhadap UMKM terbukti dapat membantu usaha untuk bertahan di masa-masa krisis. Namun sayangnya, pemanfaatan teknologi sampai saat ini baru digunakan oleh sebagian kecil pelaku usaha. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi perlu menjadi perhatian pemerintah dan kelompok organisasi masyarakat sipil dalam membantu UMKM Perempuan. Jika UMKM perempuan tidak familiar dengan penggunaan teknologi maka, usaha yang dijalankan tidak akan bisa memberi daya ungkit terhadap ekonomi pelaku dan pada ekonomi nasional secara lebih luas.

Krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 akan sangat berbeda dengan karakter krisis yang pernah terjadi sebelumnya. Tak hanya menghantam sektor keuangan, krisis ini menjadi pukulan berat bagi sektor riil. Meski demikian, UMKM akan tetap memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ditopang oleh konsumsi domestik tinimbang permintaan global. Untuk memastikan agar

UMKM memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam merespon situasi krisis, PRAKARSA merekomendasikan beberapa hal, yaitu:

- Pemerintah perlu terus mendorong peran aktif lembaga keuangan dalam pembiayaan sektor UMKM. Revitalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendesak dilakukan terutama melalui ekstensifikasi penyaluran KUR kepada sektor usaha mikro dan kecil yang unbankable, termasuk usaha yang dimiliki atau dikelola oleh kelompok perempuan dengan bertumpu pada prinsip-prinsip keuangan inklusif.
- Pemerintah perlu membuat instrumen monitoring dan evaluasi program yang efektif antara lain dengan optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Kredit Program berbasis online untuk memastikan KUR tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih pembiayaan UMKM.
- Pemerintah perlu melakukan sinergi antar kementerian dan lembaga (Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Bappenas), BUMN, BUMD, BUMDes untuk menjadi penyangga sektor UMKM dengan memperkuat akses, kapasitas, dan konektivitas UMKM.
- Pemerintah perlu melakukan kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk menyediakan fasilitas pendampingan usaha terutama terkait pelatihan teknik produksi yang mematuhi protokol kesehatan, penguasaan teknologi, serta pemasaran digital agar UMKM dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku dan preferensi konsumen dalam era tatanan baru (new normal) pasca Covid-19.

Referensi

1. Mawesti, Dia., et al (2018). Inklusi Keuangan Bagi Perempuan: Akses dan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat. ResponsiBank Indonesia.
2. Badan Pusat Statistik. 2018. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Tahun 2017-2018. (online). [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf). Diakses pada 4 Mei 2020.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
4. Data Kredit UMKM September 2018, Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia. (online). <https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/data/Pages/Data-Kredit-UMKM-September-2018--.aspx>. Diakses pada 30 Mei 2020.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi dari Corona
6. Statistik Perbankan Indonesia 2019, Otoritas Jasa Keuangan
7. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas PBI Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM.
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019.
9. The Impact and Policy Responses for COVID-19 in Asia and the Pacific, UNESCAP
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
11. OECD. 2020. Coronavirus (COVID-19): SME policy responses. (online). <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/#tablegrp-d1e2184>. Diakses pada 15 Juni 2020.
12. Kemenkeu. 2020. Program Pemulihan Ekonomi Nasional. (online). <https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonomi-nasional.pdf>. Diakses pada 16 Juni 2020.
13. <https://katadata.co.id/berita/2020/05/16/bisnis-e-commerce-dan-logistik-berpeluang-besar-di-tengah-pandemi>